

AKIBAT HUKUM IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 TERHADAP PROFESI ADVOKAT DI INDONESIA DAN PERAN SERTA ADVOKAT DALAM MENYUKSESKAN IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

ABSTRAK

**ADELAIDE SAKTI NING AYU DAENG NERATA
1187045**

Salah satu tujuan Masyarakat Ekonomi Asean yaitu meliberalisasikan tenaga kerja, dimana setiap orang bebas mencari pekerjaan di seluruh wilayah ASEAN untuk meningkatkan stabilitas perekonomian antar Negara. Menyikapi kemajuan perekonomian tersebut akhirnya pemimpin Negara anggota ASEAN menyepakati pedoman MEA 2015 oleh sebuah cetak biru 2015. Pelaksanaan cetak biru 2015 di Indonesia, menyebabkan permasalahan hukum atas berlakunya MEA 2015 yang secara substansial tidak ada pembatasan untuk pemasok jasa ASEAN dalam memberikan pelayanan dan membangun perusahaan lintas batas nasional atau disebut dengan *Free Flow of Service And Skilled Labour* sehingga dapat memfasilitasi mobilitas tenaga profesional dalam bidang jasa khususnya advokat di Indonesia dengan menerima pekerja asing atau advokat asing masuk untuk berpraktek di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual Dengan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder studi kepustakaan, bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan kamus, media social, jurnal maupun buku hukum yang berkaitan dengan akibat hukum dari implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan peran serta advokat dalam menyukseskan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh bahwa dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Secara yuridis, tidak terdapat pengaruh besar melainkan banyaknya wacana persiapan ratifikasi undang-Undang saja. Namun, secara non yuridis menuntut advokat untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan menguasai penyelesaian non litigasi menghadapi pekerja asing yang berdatangan dari berbagai negara di wilayah ASEAN dengan memberikan konsultasi hukum terhadap sengketa tenaga kerja asing khususnya ke-8 bidang dalam *Mutual Recognition Agreement* (MRA) yaitu khususnya bidang akuntansi, jasa praktisi bidang kesehatan dan dokter gigi. Bentuk peran serta advokat Dengan membantu pemerintah dalam menegakan hukum sesuai aturan yang berlaku di Indonesia berdasarkan kode etik sebagai pedoman beracara sebagai penegak hukum. Di samping itu, perlu adanya harmonisasi hukum Undang-Undang advokat dengan cetak biru 2015 agar tidak terjadi multitafsir yang menyebabkan konflik internal serta dapat melakukan kerjasama hukum yang baik dan professional dengan kantor hukum advokat asing

Kata kunci : Akibat Hukum, Masyarakat Ekonomi, Advokat

LEGAL CONSEQUENCES OF THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC 2015) IMPLEMENTATION FOR THE ADVOCATE PROFESSION IN INDONESIA AND THE ROLE OF ADVOCATES IN THE SUCCESS OF THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

ABSTRACT

ADELAIDE SAKTI NING AYU DAENG NERATA

1187045

One of the objective of the Asean Economic Community is to liberalize labor, where everyone is free to seek employment throughout the ASEAN region to boost the economic stability among nations. Addressing the economic progress eventually leaders of ASEAN member countries agreed on AEC 2015 guidelines in a blueprint for 2015. Implementation of the 2015 blueprint in Indonesia causing legal issues whereas in AEC there is no substantial restriction to ASEAN services suppliers in providing services and building cross- national enterprises or so called the Free Flow of Service and Skilled Labour as to facilitate the mobility of professionals in the field of services, especially advocates in Indonesia to accept foreign workers or foreign lawyers to practice in Indonesia.

This research uses normative juridical conceptual approaches. The data obtained were use the secondary data collection, study of literature, the primary legal materials as legislation and dictionaries, social media, journals and books of laws related to the legal consequences of the implementation of the AEC 2015 and the role of the advocate in the success of the ASEAN Economic Community 2015.

Based on the research results showed, the implementation of the ASEAN Economic Community in 2015 as for juridical has no great influence, but but rather abundance of discourse preparation of the ratification statute only. However, advocate demands to improve communication skills and and mastering non settlement of litigation facing the foreign workers that arriving from various countries in the ASEAN region by providing legal consultations on the dispute over foreign workers , particularly in the 8 fields of the Mutual Recognition Agreement (MRA) i.e. the fields of accounting, services of health practitioners and dentists. The advocates participate by assisting the government in enforcing the law according to the rules that apply in Indonesia based on the code of ethics as guidelines for the law enforcement. In addition, the need for harmonization of laws between the advocate act with the 2015blueprint in order to avoid multiple interpretations that lead to internal conflict and able to create legal cooperation and professional with a foreign lawyer Law Office

Keywords : Advocacy, Legal Consequences, Legal Protection, Implementation of AEC 2015, Succeeding Role.